

DAMPAK KARTU PRAKERJA TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDONESIA

Mohammad Yasin

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Mohammadyasin@gmail.com,

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta menganalisis dampak yang terjadi terhadap anggaran pemerintah dalam kartu prakerja tahun 2023 sebesar 4.37 Triliun terhadap perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pandemi Covid- 19 telah melanda beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Kartu Prakerja merupakan bantuan dari pemerintah dalam menangani masalah masyarakat dengan memberikan serta menghubungkan masyarakat dengan berbagai macam pelatihan keterampilan guna memberikan modal untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi mandiri. Pemerintah berharap agar masyarakat mampu dan berdaya guna untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode campuran melalui pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, dokumen cetak atau sumber dan informasi lainnya serta mendalami proses pelaksanaan program kartu prakerja. Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya kartu prakerja ini berpengaruh terhadap tingkat perekonomian serta pendapatan masyarakat. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kopetensi tenaga kerja maka masyarakat memiliki bekal untuk meningkatkan perekonomian secara mandiri. Sosialisasi dilakukan instansi hanya melalui media social Instagram guna mengurangi pihak – pihak yang menyalahgunakan adanya kegiatan kartu prakerja.

Kata kunci : Covid – 19, Kartu Prakerja, Pendapatan , Ekonomi Masyarakat

Abstract. This study aims to determine the impact and analyze the impact that has occurred on the government budget in the 2023 pre-employment card of 4.37 trillion on the economy and increasing people's income. The Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, one of which is Indonesia. The Pre-Employment Card is assistance from the government in dealing with community problems by providing and connecting the community with various types of skills training to provide capital for the community to carry out independent economic activities. The government hopes that the community will be able and efficient to reduce dependence on other parties. This study used a mixed method by collecting data from several books, journals, printed documents or other sources and information and exploring the process of implementing the pre-employment card program. The results of this study show that the pre-employment card has an effect on the level of the economy and people's income. With the training conducted to increase the competency of the workforce, the community has the provision to improve the economy independently. Socialization is carried out by agencies only through Instagram social media in order to reduce parties who misuse pre-employment card activities.

Keywords: Covid – 19, Pre-Employment Card, Income, Community Economy

PENDAHULUAN

Pandemi covid – 19 yang melanda seluruh negara dan salah satunya negara Indonesia sangat mempengaruhi perekonomian serta Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dampak dari pandemic covid ini sangat cepat sehingga pemerintah melakukan banyak berbagai Langkah serta kebijakan dalam mengantisipasi dampak sosial.¹

Ditengah pandemic, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang (UU) nomor 11/2020 dan beberapa peraturan pelaksanaan pemerintah (PP) nomor 35/2021 dan PP nomor 36/2021 paling terkait kepada pekerja atau buruh. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan menerbitkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang, perlu dilakukan evaluasi melalui asas manfaat dan aksesibilitas untuk menentukan apakah Program Kartu Prakerja sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan tersebut tidak hanya tentang problematika dalam pembangunan ekonomi, politik serta administrasi negara saja, akan tetapi terkait dengan kehidupan social masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, menjadi salah satu kebijakan untuk mengharapkan masyarakat bertahan. Sehingga dampak pandemic yang melanda berkurang. ²

Tingkat pengangguran terbuka Indonesia atau OUR juga meningkat signifikan selama tiga tahun terakhir. ini dapat ditemukan di situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 hanya sebesar 5,30% dan pada tahun 2019 hanya sebesar 5,23%. Namun, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2020 sebesar 7,07%. Khususnya di Indonesia salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Kartu Prakerja sebagai inisiatif kebijakan pemerintah untuk membina angkatan kerja dengan harapan dapat meminimalisir tingkat pengangguran.³

Program kartu prakerja pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 4,37 Trilliun dengan rincian target diantaranya : pada awal tahun 2023 target capaian hingga 1 juta penerima, pada tahap awal ini anggaran akan dialokasikan sebesar Rp.2,67 Trilliun dengan mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisaa target sebesar 405 ribu orang. Pada tahap kedua, pemerintah mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebanyak 1Rp. 7 Trilliun.

¹ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.

² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.

³ Permata, NCQ (2020). “Analisis Kebijakan Kartu Prakerja Terhadap Pekerja yang Di-PHK Untuk Mengatasi

Pengangguran di Indonesia”. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 1-15.

Dalam pelaksanaan program kartu prakerja dilakukan secara luring, daring maupun bauran. Untuk pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima juga mengalami penyesuaian nilai yakni Rp.4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan yang akan dilaksanakan sebesar Rp.3,5 juta, kemudian insentif yang akan diberikan pasca pelatihan berlangsung sebesar Rp.600 ribu yang diberikan hanya satu kali, serta Rp. 100 ribu untuk insentif survey yang diberikan dalam dua kali pengisian survey. Dalam pelatihan, pemerintah memberikan durasi pelatihan sebanyak 15 jam.⁴

Program Kartu Prakerja sangat relevan dengan teori dari Olaniyi (2020) yang menyatakan bahwa ketika kondisi perekonomian masyarakat merosot drastis, Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat menjadi acuan utama yang menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, terutama bila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat atau hambatan.⁵

Cara negara-negara di dunia menghadapi penyebaran Covid-19 bisa dibilang sama satu sama lain, seperti kebijakan *lockdown* dan pembatasan interaksi berskala besar untuk meminimalisir jumlah korban. Jika dicermati, pembatasan akibat lockdown tentu akan mengganggu aktivitas normal di berbagai negara baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pariwisata. Karena hampir tidak ada akses keluar masuk antar warga negara lain, otomatis melemahkan interaksi dan meningkatkan devisa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gejala normal akibat wabah internasional. Salah satu negara yang terkena dampak kerugian dan tekanan akibat Covid-19 adalah Indonesia yang mengalami himpitan ekonomi secara luas. Lesunya perekonomian ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, akibat berbagai pembatasan operasional yang melibatkan banyak perusahaan besar dan pelaku ekonomi lainnya. Penerapan social distancing menjadi salah satu pemicunya. Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB untuk mempercepat pemulihan kondisi dan situasi. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan

⁴ www.kominfo.go.id, diakses tanggal 27 Juni 2023 pukul 18.00 wib.

⁵ Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M. and Nurhidayati, S., 2020. Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari Covid-19 padamasyarakat rentan di indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities,1(2), pp.130-139.

bentuk penanganan yang serius. Tidak dapat disangkal, fundamental aspek kenegaraan Indonesia merupakan objek kritis yang menjadi fokus utama Pemerintah.⁶

Mengenai mekanisme pendaftaran, Pemerintah Indonesia tidak membedakan individu. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, selama warga negara Indonesia berusia 18 tahun dan belum saat ini dipersilakan untuk mendaftar secara online. Selanjutnya, jika pendaftar sudah lolos seleksi berkas, maka langkah selanjutnya adalah dilanjutkan dengan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Peserta yang lulus diperbolehkan mengikuti pelatihan dan akan mendapatkan sertifikat elektronik saat pelatihan selesai. Selain itu, sifat dari pencairan uang pembinaan adalah peserta harus terlebih dahulu mengikuti dalam bentuk pelatihan, yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan modal diri setelah pelatihan.

Namun, jika kebijakan tersebut dikaitkan dengan relevansi situasi dan kondisi di suatu negara, termasuk Indonesia, maka publik atau masyarakat akan terkena dampaknya secara langsung. Sehingga wujud dari kualitas kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya menjadi faktor penentu keadaan. Contohnya adalah kasus Kartu Prakerja, dimana Pemerintah mengikutsertakan sentuhan digital dan perantara untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam pelatihan strategis. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana upaya Pemerintah dalam membekali warga negara menjadi terampil dan tangkas untuk lebih menunjang kemampuannya sehari-hari dalam kelangsungan hidup.⁷

TINJAUAN LITERATUR

Berbagai penelitian mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan, termasuk di Indonesia. Sebagian besar kajian tersebut mencakup strategi kebijakan sosial ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai fenomena akibat pandemic COVID-19. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melakukan beberapa penelitian yang umumnya berfokus pada kebijakan perlindungan sosial, dan bagaimana mengimplementasikannya di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki beberapa program sebagai jaring pengaman COVID-19, yaitu Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan/ PKH),

⁶ Consuello, Y., 2020. Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid 19. Adalah, 4(1), pp.93-100.

⁷ Pratiwi, A.D., 2020. Gambaran penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat di kabupaten muna. Prosiding Nasional Covid-19, pp.52-57.

Kartu Sembako/Kartu Sembako, Padat Karya Tunai / PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras Bulog/ Program Bantuan Beras Bulog, Bantuan Sosial Tunai (BST), Subsidi Listrik, Kartu Prakerja /Kartu Prakerja, Subsidi Kuota Internet dan Desa Bantuan Dana Langsung Tunai (BLT-DD).⁸

Dalam Program Kartu Prakerja, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan ingin mendapatkan pelatihan kerja akan mendapatkan biaya dan pelatihan kerja. Selain itu, orang yang akan masuk kerja mungkin Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan. akan lebih berkompeten, memiliki keahlian dalam bidang pekerjaannya dan tentunya akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia.⁹

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian khususnya bagi Tinjauan Literatur masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.¹⁰ Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, yaitu misi meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan misi meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk membantu para pencari kerja dalam meningkatkan keterampilannya sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini .¹¹

Pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya tingkat penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, dan kesulitan pemenuhan bahan baku. Ada beberapa kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain: dengan memberikan bantuan sosial kepada UMKM miskin dan rentan; insentif pajak bagi UMKM; relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; perluasan pembiayaan modal kerja; dan pelatihan e-learning. Untuk mendukung kebijakan

⁸ Nugroho, AA, dan Azmi, IF (2021). Meredakan Krisis Ekonomi Masyarakat: Narasi Kebijakan Proses Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Kebijakan & Tinjauan Tata Kelola*, 5(2), 113-127.

⁹ Zubaidia, N., Pratama, RG, dan Al-Fatih, S. (2020). Perspektif Hukum Terhadap Efektivitas Kartu Prakerja untuk Orang Indonesia. *Jurnal Bestuur*, 8(1), 9-18.

¹⁰ Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., and Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia: Kajian Program Kartu Prakerja. *Jurnal dari Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(3), 247-259.

¹¹ Halimatussadiyah, A., Cesarina, A., Siregar, A. A., Hanum, C., Wisana, D., Rahardi, F. and Kurniawan, R. (2020). *Berpikir ke Depan: Agenda Indonesia untuk Pemulihan Berkelanjutan dari Pandemi COVID-19*. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Economics and Business, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) and Ministry of Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

pemerintah tersebut, ada beberapa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah¹².

Penyebaran Virus Corona menyebabkan beberapa industri dan pengusaha mengalami kerugian akibat penurunan produksi.¹³ Oleh karena itu, banyak perusahaan memberhentikan mereka. Banyak negara telah menerapkan beberapa kebijakan mengenai program transfer langsung. Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan. pekerja. Pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi memungkinkan perusahaan menutup usahanya secara permanen.¹⁴ Uang pesangon tetap harus diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Untuk menghadapi kondisi tersebut, selanjutnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja yang dapat diperoleh oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Tujuan dari Kartu Prakerja ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja; dengan demikian, mereka dapat siap untuk memasuki kembali pasar tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah campuran dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif melalui pengumpulan data yang dideskripsikan secara rinci dan teratur. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, dokumen cetak atau sumber dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data menggunakan teknik reduksi data dan analisis dengan model *Social Accounting Matrik* (SAM). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan memvalidasi dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian data dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan.¹⁵ Untuk memperkirakan dampak dari kartu prakerja dengan menggunakan matrik sebagai keseimbangan social dan ekonomi secara keseluruhan, sehingga kerangka kerja SAM dapat digunakan untuk memperkirakan efek dari perubahan eksogen dan

¹² Hidayat, W. W., Soehardi, Prasetyo, E. T. and Husadha, C. (2021). Implications of Covid-19 Pandemi UMKM terhadap Perekonomian, Masyarakat: Kasus di Negara Indonesia. *Farmasi Tinjauan Sistematis*, 12(4), 71-78.

¹³ Ivanka, N. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar: Apa Selanjutnya? *Jurnal Indonesia dari Pendidikan Hukum Klinis Internasional. Jurnal Internasional Indonesia Pendidikan Hukum Klinis*, 2(2), 201-214.

¹⁴ Mahy, P. (2020). Covid-19 dan Hukum Ketenagakerjaan: Indonesia. *Jurnal Elektronik Hukum Perburuhan Italia*, 13(1), 1-10

¹⁵ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

injeksi ke dalam ekonomi. Setiap matrik di SAM akan ditranmisikan melalui akun social ekonomi yang saling terkait kemudian menggunakan multiplier sebagai pemrosesan sehingga dapat diperoleh dengan membagi elemen neraca dengan total pendapatan di setiap kolom matrik itu berada.

Kerangka Analisis SAM

Analisis pengganda dalam model SAM dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pengganda akuntansi dan pengganda harga tetap. Analisis multiplier akuntansi pada dasarnya sama dengan multiplier dari Leontief Inverse Matrix yang terdapat pada model IO. Sedangkan analisis pengganda harga tetap mengarah pada analisis respon rumah tangga terhadap perubahan keseimbangan eksogen dengan memperhatikan kecenderungan pengeluaran. Selanjutnya, jika diasumsikan kecenderungan rata-rata pengeluaran A_{ij} yang merupakan perbandingan antara pengeluaran sektor ke-j untuk sektor ke-i dengan pengeluaran j-total (Y_j), maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$I = A + X/Y$$

$$I - A = X/Y$$

$$(I - A) Y = X$$

$$Y = (I - A)^{-1} X$$

Jika $M_a = (I - A)^{-1}$ maka $Y = M_a X$

Dimana A adalah koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada satu sector terhadap sector lainnya. M_a matriks adalah pengganda keseimbangan yang menunjukkan pengaruh suatu sector terhadap sector lain dari keseluruhan SAM. Matriks X menunjukkan keseimbangan eksogen.

Asumsi dalam Kajian Dampak Kartu Prakerja

Kajian ini menggunakan beberapa asumsi dalam mensimulasikan dampak kartu prakerja terhadap perekonomian dan pendapatan masyarakat. Asumsinya adalah:

- a. Program kartu prakerja diberikan kepada Rumah Tangga Perkotaan dan Bidang Layanan Pendidikan
- b. Kartu Prakerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan ekonomi

Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

No	Bidang Ekonomi	Persen
1	Tanaman Pangan	0,66
2	Tanaman Lainnya	0,14
3	Ternak	0,34
4	Kehutanan	0,07
5	Perikanan	0,30
6	Batu Bara	0,03
7	Biji Minyak	0,03
8	Pertambangan	0,21
9	Makan dan minum	0,20
10	Tekstil	0,14
11	Kayu	0,12
12	Peralatan	0,17
13	Bahan Kimia	0,23
14	Konstruksi Listrik, Gas, Air	0,21
15	Restoran	0,42
16	Hotel	0,09
17	Transportasi Darat	0,13
18	Angkutan Udara-Air	0,07
19	Penunjang Transportasi	0,12
20	Bank - Keuangan	0,14
21	Real Estate	0,11
22	Layanan Pemerintah	0,71
23	Jasa Lainnya	0,35
24	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	0,24

Sumber : Data yang diolah

Kartu prakerja diharapkan berdampak signifikan pada sektor ekonomi tertentu. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pemberian bantuan melalui mekanisme ini memberikan dampak yang paling tinggi pada Sektor Jasa Pemerintah sebesar 0,71 persen. Enam sektor berikutnya yang paling terkena dampak bantuan kartu prakerja

adalah Sektor Tanaman Pangan (0,66 persen), Sektor Restoran (0,42 persen), Sektor Peternakan (0,34 persen), Sektor Jasa Lainnya (0,35 persen), Sektor Perikanan (0,30 persen).) dan Sektor Listrik-Gas-Air (0,21 persen). Di sisi lain, Kebijakan Kartu Prakerja juga berdampak sangat kecil pada sektor tertentu. Sektor pertambangan di luar batu bara dan

minyak hanya tumbuh 0,03 persen karena kebijakan kartu prakerja. Demikian juga beberapa persen disektor lainnya kecil meski anggaran Kartu Prakerja terealisasi 100 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Prakerja dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 1, secara keseluruhan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 0,22 persen. Di masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah. Total anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp. 4.37 triliun dianggap mampu memberikan *trade off* yang memadai dari perspektif ekonomi. Namun jika dilihat dari tujuan utamanya sebagai instrumen jaring pengaman pekerja akibat Covid 19, Kebijakan Kartu Prakerja berdampak anomali pada sisi ketenagakerjaan. Misalnya, di antara beberapa sektor yang paling besar dampaknya, terdapat jasa pemerintahan, restoran, dan jasa lainnya yang merupakan sektor yang dapat dikategorikan tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, sektor konstruksi dan pertambangan, di luar batu bara atau minyak, yang menyerap banyak tenaga kerja, pertumbuhannya kecil.

Namun secara keseluruhan, kartu prakerja dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang dapat diandalkan. Dari sisi ekonomi, pemerintah membutuhkan instrumen yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tidak berkontraksi akibat pandemi. Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi meskipun berdampak anomali terhadap lapangan kerja tetap patut dipertimbangkan. Pemerintah perlu menemukan solusi kreatif untuk membangun respons perlindungan sosial yang komprehensif terhadap dampak ekonomi dari epidemi COVID-19. Program retensi pekerjaan yang ada di negara seperti Brasil, misalnya, dapat menjadi pelajaran untuk digunakan secara lebih luas dalam melindungi pekerjaan di sektor formal dan informal. Tantangan untuk memitigasi dampak ekonomi dari pandemi ini sangat besar. Kecepatan penyelesaian solusi sangat diperlukan, solusi apapun akan kurang bermanfaat jika tidak dilakukan dengan cepat untuk mengatasi penurunan kinerja perekonomian akibat Covid-19.

Indonesia membutuhkan dukungan keuangan baik secara internal maupun eksternal untuk menciptakan ruang ekonomi untuk respons yang efektif. Strategi koalisi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan jaring pengaman sosial. Terkait program jaring pengaman Covid-19, setidaknya pemerintah telah memiliki beberapa program sebagai jaring pengaman Covid 19, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Pekerjaan Padat Tunai (PKT),

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Bantuan Beras Program Bulog, Bantuan Sosial Tunai (BST), Subsidi Listrik, Kartu Prakerja, Subsidi Kuota Internet dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah telah mengembangkan rencana pemulihan ekonomi yang berkonsentrasi untuk melindungi dampak jangka pendek dari krisis dan mendukung masyarakat miskin dan hampir miskin, daripada mengurangi kemiskinan jangka panjang dan mencegah perubahan struktural dalam pengangguran.

Tujuan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam Program Kartu Prakerja adalah untuk dapat memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun, proses pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dalam Program Kartu Prakerja belum menunjukkan dampak perbaikan dan perubahan ekonomi atau sosial di masa pandemi COVID-19 yang diharapkan masyarakat. Tidak tercapainya tujuan yang maksimal, akibat penetapan kebijakan perlindungan sosial yang tidak digunakan dalam keadaan darurat. Selain itu, para pelaku Program Kartu Prakerja memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, baik dari pihak pelaksana maupun pihak penerima. Ditemukan bahwa respons kebijakan sosial Indonesia terhadap pandemi terutama melalui realokasi anggaran pemerintah untuk membiayai program jaring pengaman sosial yang ditargetkan yang mencakup bantuan sosial, dukungan keluarga, dan tunjangan pasar tenaga kerja (Kartu Prakerja, Subsidi Upah, dan Bantuan Produktif). untuk Usaha Mikro). Meskipun sebagian dari jaminan sosial tersebut sangat dibutuhkan, pemerintah lebih memilih untuk memprioritaskan tunjangan pasar tenaga kerja untuk mendukung produktivitas ekonomi. Namun, realokasi anggaran ini tidak cukup untuk menutupi semua masyarakat miskin, sehingga pemerintah mencari dukungan keuangan dari Bank Dunia, obligasi global, dan pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dan regulasi Program Kartu Prakerja sebagai skala prioritas untuk menghindari kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan sosial yang akan merugikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan Program Kartu Prakerja tentang orientasi program, inovasi program dan desain program. Pemerintah Indonesia harus melakukan proses pendampingan dengan membentuk Badan Pengawas Cipta Kerja yang akan memperhatikan kebijakan perlindungan sosial dalam Program Kartu Prakerja. Pembentukan Dewan Pengawas Panitia Cipta Kerja memiliki fungsi kontrol dalam

mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan perlindungan sosial pada Program Kartu Prakerja yang akan terus berlanjut di masa mendatang.

2. Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat

Tabel.2

Pendapatan Masyarakat

No	Sektor Rumah Tangga	Persen
1	Buruh Pertanian	0,02
2	Pengusaha Pertanian	0,06
3	Pedesaan Non Pertanian Rendah	0,02
4	Pedesaan Non Pertanian Lainnya	0,02
5	Pedesaan Non Pertanian Tinggi	0,06
6	Perkotaan Non Pertanian Rendah	0,26
7	Perkotaan Non Pertanian Lainnya	0,02
8	Perkotaan Non Pertanian	0,06

Sumber : Data yang diolah

Hasil analisis menggunakan Social Accounting Matrix (SAM) menunjukkan bahwa bantuan pemerintah melalui Program Kartu Prakerja lebih berdampak di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Data pada Tabel 2 menunjukkan sektor-sektor di perkotaan yang mengalami peningkatan pendapatan yang besar. Dampak di perkotaan lebih banyak dinikmati oleh mereka yang berpendapatan tinggi, seperti Perkotaan Non Pertanian Rendah 0,26 persen dan Perkotaan Non Pertanian Tinggi 0,06 persen. Di sisi lain, masyarakat miskin pedesaan hanya mendapat sedikit manfaat dari Program Kartu Prakerja.

Pertumbuhan Tinggi Perkotaan Non-Pertanian hampir sama dengan pertumbuhan pengusaha di bidang pertanian. Hal ini berimplikasi bahwa masyarakat ekonomi atas (di perkotaan dan pedesaan) secara tidak langsung turut menikmati dampak dari bantuan kartu prakerja. Kemungkinan masyarakat ekonomi atas mendapatkan dampak dari konsumsi berupa pengeluaran penerima bantuan kartu pra kerja dari insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu secara perlahan selama 4 bulan. Bantuan kartu prakerja diberikan melalui transfer tunai. Program Kartu Prakerja dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi

dampak langsung COVID-19. Kebijakan kartu prakerja dapat merangsang respon publik, termasuk dukungan dari anggota masyarakat. Dukungan yang paling menonjol datang dari masyarakat dalam bentuk gotong royong yang memberikan bantuan informal kepada masyarakat miskin. Dukungan masyarakat untuk kemiskinan dan partisipasi lembaga global dalam penyediaan kesejahteraan, mampu mengatasi keterbatasan kebijakan sosial negara pada masa kesulitan sosial ekonomi, terutama karena keterbatasan anggaran. Banyak negara berpenghasilan tinggi menerapkan program pasar tenaga kerja seperti hibah untuk mendukung perusahaan dan bisnis. Hal ini dapat membantu mereka mengatasi angka pengangguran yang semakin meningkat akibat pandemi COVID-19.

Program Kartu Prakerja merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Seluruh warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal dapat mengajukan permohonan. Untuk merespon dampak pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara akan memprioritaskan pekerja/ buruh yang di-PHK serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak mata pencahariannya. Dengan dilaksanakannya Program Kartu Prakerja 2023 ini bertujuan untuk mengurangi dampak besar dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat dan solusi dalam:

- a) Membantu mengurangi biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan.
- b) Mampu menekan biaya dalam mencari informasi tentang pelatihan
- c) Mengurangi ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan perusahaan
- d) Melengkapi Pendidikan formal

PENUTUP

Simpulan

Bahwa Program Kartu Prakerja anggaran Rp. 4,37 Triliun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi yang sangat berkaitan dengan perkembangan penyedia kesempatan kerja, distribusi pendapatan serta output yang dihasilkan bisa maksimal. Berdasarkan dari sudut pandang pembangunan ekonomi, hubungan antara keterkaitan sector ekonomi akan selalu terjadi, sehingga setiap sector ekonomi dapat mempengaruhi atau saling bergantung antara satu dengan yang lain. Adapun sector yan

tumbuh tinggi akibat dari pengalokasian kartu prakerja adalah sector jasa pemerintah, dilanjutkan sector tanaman pangan, restoran, peternakan serta sector lainnya.

Dalam bidang pendapatan masyarakat, program kartu prakerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam sector rumah tangga. Sebagian besar menikmati dampak dari manfaat program kartu prakerja. Dengan adanya kartu prakerja masyarakat memiliki skill dari hasil pelatihan yang didapatnya. Output yang dihasilkan dari kartu prakerja adalah masyarakat mampu menambah pendapatan mandiri dengan menggunakan hasil pelatihan untuk ekonomi mandiri.

Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ada beberapa kendala dari kegiatan program kartu prakerja yaitu kegiatan yang melalui daring terkendala dengan sinyal, sehingga ada beberapa pelatihan kurang bisa maksimal. Untuk kelancaran kegiatan, pemerintah lebih bisa memantau Kerjasama dengan pusat pelatihan yang bisa luring pada daerah - daerah yang tidak menjangkau sinyal internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.
- Consuello, Y., 2020. Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid 19. Adalah, 4(1), pp.93-100. [1] www.kominfo.go.id, diakses tanggal 27 Juni 2023 pukul 18.00 wib.
- Hidayat, W. W., Soehardi, Prasetyo, E. T. and Husadha, C. (2021). Implications of Covid-19 Pandemi UMKM terhadap Perekonomian, Masyarakat: Kasus di Negara Indonesia. *Farmasi Tinjauan Sistematis*, 12(4), 71-78.
- Ivanka, N. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar: Apa Selanjutnya? *Jurnal Indonesia dari Pendidikan Hukum Klinis Internasional. Jurnal Internasional Indonesia Pendidikan Hukum Klinis*, 2(2), 201-214.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., and Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia: Kajian Program Kartu Prakerja. *Jurnal dari Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(3), 247-259.
- Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M. and Nurhidayati, S., 2020. Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari Covid-19 padamasyarakat rentan di indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), pp.130-139. [1] Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.
- Mahy, P. (2020). Covid-19 dan Hukum Ketenagakerjaan: Indonesia. *Jurnal Elektronik Hukum Perburuhan Italia*, 13(1), 1-10[1] Pratiwi, A.D., 2020. Gambaran penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat di kabupaten muna. *Prosiding Nasional Covid-19*, pp.52-57.
- Nugroho, AA, dan Azmi, IF (2021). Meredakan Krisis Ekonomi Masyarakat: Narasi Kebijakan Proses Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Kebijakan & Tinjauan Tata Kelola*, 5(2), 113-127.
- Permata, NCQ (2020). "Analisis Kebijakan Kartu Prakerja Terhadap Pekerja yang Di-PHK Untuk Mengatasi Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 1-15.
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Halimatussadiyah, A., Cesarina, A., Siregar, A. A., Hanum, C., Wisana, D., Rahardi, F. and Kurniawan, R. (2020). Berpikir ke Depan: Agenda Indonesia untuk Pemulihan Berkelanjutan dari Pandemi COVID-19. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Economics and Business, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) and Ministry of Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Zubaidia, N., Pratama, RG, dan Al-Fatih, S. (2020). Perspektif Hukum Terhadap Efektivitas Kartu Prakerja untuk Orang Indonesia. *Jurnal Bestuur*, 8(1), 9-18.